



WALIKOTA MADIUN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 38 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN PENERIMAAN
KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Buku Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal 1

Menetapkan Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Penerimaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam melaksanakan penerimaan Keuangan Daerah.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 29 Desember 2017

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19610512 198803 1 010

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017
NOMOR 39/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

Lampiran Buku Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari :

1. Bab I : Ketentuan Umum
2. Bab II : Jenis Pendapatan
3. Bab III : Penerimaan melalui Bendahara Penerimaan
4. Bab IV : Penerimaan melalui Bendahara Penerimaan Pembantu
5. Bab V : Penerimaan melalui Bank
6. Bab VI : Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
7. Bab VII : Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu

F. Bentuk Formulir Penatausahaan yang dikerjakan oleh Bendahara Penerimaan

Bentuk-bentuk formulir penatausahaan dan tata cara pengisiannya dapat dilihat pada halaman berikut ini.

F.1. Bentuk Format Register Penerimaan Laporan SPJ Pendapatan Administratif dari Bendahara Penerimaan Pembantu

**PEMERINTAH KOTA MADIUN
REGISTER PENERIMAAN LAPORAN SPJ**

No	Tanggal & Nomor SPJ	SKPD	Uraian	Jumlah
1	2		3	4

Cara pengisian register penerimaan laporan SPJ

- 1) Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
- 2) Kolom 2 diisi dengan tanggal dan nomor laporan SPJ.
- 3) Kolom 3 diisi dengan nama SKPD pengirim laporan SPJ.
- 4) Kolom 4 diisi dengan uraian SPJ, misal : SPJ Januari 2018.
- 5) Kolom 5 diisi dengan jumlah total realisasi laporan SPJ.

WALIKOTA MADIUN,

tttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.